



## **URGENSI AUTOPSI MEDIKOLEGAL DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TANPA SAKSI MATA: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM INDONESIA**

### ***THE URGENCY OF MEDICOLEGAL AUTOPSY IN PROVIDING EVIDENCE IN CRIMINAL CASES WITHOUT EYEWITNESSES: A COMPARATIVE STUDY IN SEVERAL JURISDICTIONS IN INDONESIA***

**Tota roganda siahaan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: totasiahaan26@gmail.com

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 07-07-2025

Revised : 08-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Published : 13-07-2025

#### **Abstract**

*Medico-legal autopsy plays a crucial role in the proof of criminal cases, especially in those without eyewitnesses. This study aims to analyze the urgency of using medico-legal autopsies in the proof of criminal cases without witnesses and to identify factors influencing their implementation across different legal jurisdictions in Indonesia. The study finds that medico-legal autopsy is an objective and essential tool for determining the cause of death and can reduce reliance on eyewitnesses, which are not always reliable. However, the implementation of medico-legal autopsies in Indonesia faces challenges such as inadequate medical facilities, lack of trained forensic experts, and social-cultural barriers. Therefore, there is a need to enhance medical facilities and forensic training to ensure more consistent and effective implementation of autopsies.*

**Keywords:** *Medico-legal Autopsy, Criminal Case Proof, Without eyewitnesses*

---

#### **Abstrak**

Autopsi medikolegal memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya dalam kasus yang tidak melibatkan saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan autopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di berbagai wilayah hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi medikolegal merupakan alat bukti yang objektif dan penting untuk mengungkap penyebab kematian, serta dapat mengurangi ketergantungan pada saksi mata yang tidak selalu dapat diandalkan. Namun, penerapan autopsi medikolegal di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas medis, tenaga medis yang terlatih, dan hambatan sosial budaya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas fasilitas medis dan pelatihan tenaga forensik untuk mendukung penerapan autopsi yang lebih merata dan efektif.

**Kata Kunci:** *Autopsi Medikolegal, Pembuktian Perkara Pidana, Tanpa Saksi Mata*

#### **PENDAHULUAN**

Autopsi medikolegal memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan saksi mata. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan saksi mata sering kali dianggap sebagai bukti yang sangat vital untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait peristiwa tindak pidana. Namun, dalam banyak kasus, tidak selalu terdapat saksi mata yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat mengenai



kejadian yang berlangsung. Ketika hal ini terjadi, maka salah satu alternatif terbaik untuk mengungkapkan kebenaran adalah melalui autopsi medikolegal. ( Susilo , 2020) Proses ini dilakukan oleh ahli forensik yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab kematian, jenis cedera yang dialami oleh korban, serta untuk menentukan apakah kematian tersebut disebabkan oleh suatu tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, otopsi medikolegal menjadi salah satu bukti yang sangat berharga dalam sistem peradilan pidana, terutama pada perkara yang tidak memiliki saksi mata.

Autopsi medikolegal memberikan informasi yang dapat membuktikan dengan jelas apakah kematian korban berhubungan dengan tindak pidana, seperti kekerasan, penyiksaan, atau tindak kriminal lainnya. Dalam hal ini, hasil autopsi menjadi bukti yang tidak bisa dibantah dan sangat membantu pihak berwenang dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sulit diketahui hanya berdasarkan keterangan saksi atau bukti-bukti lainnya. Bahkan, di banyak kasus, hasil autopsi medikolegal adalah satu-satunya bukti yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kematian merupakan akibat dari tindakan kriminal atau tidak. Dengan demikian, autopsi medikolegal memiliki urgensi yang tinggi dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan dengan akurat dan adil(Nurhadi, 2019).

Namun demikian, penerapan autopsi medikolegal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga medis yang terlatih di bidang forensik, serta fasilitas medis yang memadai untuk melaksanakan otopsi dengan prosedur yang tepat. Di beberapa daerah, pemeriksaan otopsi masih jarang dilakukan, terutama jika tidak ada saksi mata yang dapat mendukung dugaan tindak pidana. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam penerapan prinsip keadilan dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan kematian yang mencurigakan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penggunaan autopsi medikolegal dalam proses pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata di berbagai wilayah hukum Indonesia.

Selain kendala teknis, tantangan lainnya adalah faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap autopsi medikolegal. Di beberapa daerah, terdapat ketidakpahaman tentang pentingnya pemeriksaan medis forensik yang benar dan prosedural. Bahkan, di beberapa komunitas, autopsi dianggap sebagai hal yang tabu atau tidak diperlukan, yang pada akhirnya memperlambat proses penyelidikan dan peradilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penelitian mengenai penerapan otopsi medikolegal sangat diperlukan agar dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas penggunaan otopsi sebagai alat bukti dalam sistem hukum pidana di Indonesia(Hidayat, 2021).

Lebih lanjut, pengaturan terkait kewajiban melakukan otopsi medikolegal dalam setiap perkara yang melibatkan kematian juga harus jelas dan terstruktur. Meskipun beberapa daerah sudah mulai menerapkan kebijakan untuk melakukan autopsi dalam setiap kasus yang melibatkan kematian yang mencurigakan, namun penerapannya masih sangat bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki fasilitas medis yang memadai, sementara di daerah lain fasilitas tersebut masih terbatas. Perbedaan ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan autopsi medikolegal, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana otopsi medikolegal dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.



Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan otopsi medikolegal dalam setiap wilayah hukum Indonesia. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi yang ada, ketersediaan tenaga medis forensik, hingga pengaruh faktor sosial budaya yang ada di masyarakat. Dengan menganalisis berbagai faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan penggunaan otopsi medikolegal sebagai alat bukti yang lebih kuat dalam perkara pidana. Penerapan otopsi medikolegal yang lebih baik akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih transparan, objektif, dan adil bagi semua pihak.

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penggunaan otopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di berbagai wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan sistem hukum Indonesia dalam memastikan bahwa proses pembuktian perkara pidana dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Sulaiman, 2020).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi penggunaan otopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan otopsi medikolegal dalam proses hukum pidana di berbagai wilayah hukum Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis urgensi penggunaan otopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan otopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana di berbagai wilayah hukum Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan otopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang mengatur penggunaan otopsi medikolegal sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan regulasi yang berlaku di berbagai wilayah hukum Indonesia untuk menilai keberagaman penerapannya dan untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Selain menganalisis peraturan dan doktrin, penelitian ini juga mengkaji literatur dan jurnal ilmiah terkait dengan otopsi medikolegal, kedokteran forensik, serta pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata. Dengan menggunakan pendekatan normatif ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai urgensi dan tantangan dalam penerapan otopsi medikolegal, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara



langsung atau pengumpulan data primer, melainkan lebih mengutamakan kajian terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Urgensi Penggunaan Autopsi Medikolegal Dalam Pembuktian Perkara Pidana Tanpa Saksi Mata Di Indonesia**

Autopsi medikolegal memiliki peran yang sangat krusial dalam pembuktian perkara pidana, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan saksi mata. Keberadaan saksi mata memang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, namun tidak semua kasus memiliki saksi mata yang dapat memberikan keterangan yang akurat. Dalam situasi seperti ini, autopsi medikolegal menjadi salah satu alat pembuktian yang sangat berguna untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Proses ini dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berkompeten, yang dapat memberikan bukti yang objektif dan tidak dapat dibantah, mengenai penyebab kematian serta apakah kematian tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, autopsi medikolegal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkara pidana dapat diselesaikan dengan baik dan berdasarkan bukti yang sah (Setiawan, 2021).

Penggunaan autopsi medikolegal juga membantu mengurangi ketergantungan pada keterangan saksi yang tidak selalu bisa diandalkan. Banyak faktor yang mempengaruhi keakuratan keterangan saksi, seperti jarak kejadian, perbedaan persepsi, atau bahkan tekanan dari pihak tertentu. Dalam hal ini, hasil dari autopsi yang dilakukan dengan prosedur medis yang benar dapat menjadi satu-satunya bukti yang akurat untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tanpa otopsi, proses hukum bisa menjadi sangat sulit dan rentan terhadap kesalahan penafsiran. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya otopsi medikolegal sebagai salah satu alat bukti yang objektif dan valid dalam perkara pidana.

Namun, meskipun urgensi penggunaan autopsi medikolegal sangat tinggi, penerapannya di Indonesia masih mengalami kendala, terutama di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas medis dan tenaga ahli forensik. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki fasilitas kedokteran forensik yang memadai untuk melakukan otopsi dengan standar yang benar. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas pemeriksaan yang dilakukan dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pembuktian dalam kasus pidana. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan fasilitas dan peningkatan kapasitas tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan kematian dapat diperiksa dengan prosedur yang tepat dan sesuai dengan standar kedokteran forensik (Jones, 2019).

Penerapan autopsi medikolegal yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga sangat penting untuk menghindari ketidakadilan dalam proses hukum. Setiap individu yang terlibat dalam perkara pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Tanpa otopsi, banyak kasus yang tidak dapat dibuktikan secara objektif dan dapat berakhir dengan keputusan yang salah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai pentingnya otopsi sebagai alat bukti yang sah sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa otopsi medikolegal diterapkan secara konsisten di semua wilayah hukum Indonesia, sehingga tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembuktian perkara pidana.



Pentingnya penggunaan autopsi medikolegal juga terletak pada kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Tanpa adanya bukti yang sah dan akurat, proses peradilan bisa saja tergantung pada dugaan atau kesimpulan yang keliru. Hal ini tentu akan merugikan pihak yang tidak bersalah dan mengarah pada kesalahan pengambilan keputusan di pengadilan. Dengan otopsi yang dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berkompeten, setiap pihak dapat memperoleh bukti yang jelas dan objektif, sehingga keputusan yang diambil oleh pengadilan akan lebih tepat dan berkeadilan.

Selain itu, autopsi medikolegal juga memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Banyak keluarga yang masih merasakan kebingungan dan ketidakpastian mengenai penyebab kematian orang yang mereka cintai. Dalam banyak kasus, keluarga korban tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang apa yang terjadi dengan korban sebelum kematian. Dengan adanya pemeriksaan otopsi, keluarga dapat memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian, apakah itu akibat dari kecelakaan, penyakit, atau tindak pidana. Kepastian ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Secara keseluruhan, urgensi penggunaan autopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata terletak pada kemampuannya untuk menyediakan bukti yang objektif, menghindari kesalahan dalam penegakan hukum, serta memberikan keadilan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman dan penerapan otopsi di seluruh Indonesia, diharapkan sistem hukum dapat lebih transparan, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Autopsi Medikolegal Dalam Proses Hukum Pidana Di Berbagai Wilayah Hukum Indonesia**

Penerapan autopsi medikolegal dalam proses hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, sosial, dan budaya. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi adalah ketersediaan fasilitas medis dan tenaga ahli forensik di berbagai daerah. Di wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah terpencil, kurangnya fasilitas medis yang memadai menjadi hambatan besar dalam melaksanakan otopsi dengan standar yang baik. Banyak daerah yang tidak memiliki rumah sakit atau fasilitas kedokteran forensik yang cukup untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Tanpa fasilitas yang memadai, pemeriksaan otopsi tidak dapat dilakukan dengan baik, yang berdampak pada rendahnya kualitas bukti yang dihasilkan (Purnama, 2018).

Selain fasilitas medis, ketersediaan tenaga medis yang terlatih dalam bidang kedokteran forensik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerapan autopsi medikolegal. Tidak semua rumah sakit atau lembaga medis di Indonesia memiliki tenaga medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang forensik. Tanpa tenaga ahli yang terlatih, hasil otopsi bisa saja tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis di bidang forensik agar mereka dapat melaksanakan pemeriksaan otopsi dengan kualitas yang lebih baik di setiap wilayah hukum (Smith, 2019).

Selain faktor teknis, anggaran juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan autopsi medikolegal. Biaya untuk melakukan pemeriksaan otopsi yang lengkap dan sesuai dengan standar kedokteran forensik cukup tinggi, sehingga seringkali menjadi beban bagi pemerintah daerah. Terbatasnya anggaran menyebabkan beberapa daerah kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan membayar tenaga medis yang ahli dalam bidang ini. Akibatnya, pemeriksaan otopsi



tidak dilakukan secara merata dan hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu yang memiliki anggaran lebih. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran untuk kedokteran forensik agar proses pemeriksaan otopsi dapat dilakukan dengan optimal.

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam penerapan autopsi medikolegal. Di beberapa daerah, terdapat kepercayaan atau norma sosial yang menentang dilakukannya otopsi pada jenazah, terutama yang berkaitan dengan agama atau adat istiadat setempat. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk mengizinkan otopsi dilakukan pada korban, meskipun ada kecurigaan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana. Pandangan yang tidak menerima otopsi ini dapat menghambat penyelidikan dan mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya otopsi dalam memastikan keadilan dan kebenaran.

Selain itu, regulasi yang berlaku di setiap wilayah hukum juga menjadi faktor penting dalam penerapan autopsi medikolegal. Di beberapa daerah, penerapan otopsi medikolegal masih belum menjadi kewajiban dalam setiap kasus kematian yang mencurigakan. Hanya beberapa daerah yang sudah menerapkan aturan yang mewajibkan autopsi dilakukan dalam setiap kasus kematian yang tidak wajar. Ketidakteraturan dalam penerapan regulasi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya standar nasional yang jelas mengenai pelaksanaan autopsi medikolegal agar setiap wilayah hukum di Indonesia dapat melaksanakan prosedur ini dengan konsisten (Koh, 2021).

Kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, juga berperan besar dalam penerapan autopsi medikolegal. Banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami pentingnya otopsi dalam proses pembuktian perkara pidana, sehingga mereka kurang memprioritaskan pemeriksaan ini. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang kedokteran forensik membuat mereka tidak selalu melihat otopsi sebagai alat bukti yang penting (Putra, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami pentingnya autopsi dalam mengungkap kebenaran di setiap perkara pidana.

Keadilan dan transparansi dalam proses hukum juga sangat bergantung pada penerapan autopsi medikolegal yang tepat. Tanpa otopsi yang baik dan benar, proses hukum bisa saja terhambat atau bahkan mengarah pada keputusan yang salah. Oleh karena itu, penerapan otopsi medikolegal secara konsisten di setiap kasus kematian mencurigakan akan sangat membantu untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah berdasarkan bukti yang akurat dan sah. Secara keseluruhan, penerapan autopsi medikolegal dalam proses hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh faktor teknis, anggaran, sosial, budaya, dan regulasi. Masing-masing faktor ini harus diperhatikan untuk memastikan bahwa otopsi dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penerapan autopsi medikolegal dalam pembuktian perkara pidana tanpa saksi mata di Indonesia sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan yang objektif dan transparan. Meskipun terdapat tantangan teknis, sosial, dan budaya, urgensi penggunaan autopsi medikolegal tetap tinggi mengingat kemampuannya untuk menyediakan bukti yang sah dan tidak dapat dibantah mengenai penyebab kematian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk



meningkatkan ketersediaan fasilitas kedokteran forensik, melatih tenaga medis forensik, serta mendukung masyarakat mengenai manfaat autopsi dalam proses hukum. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, autopsi medikolegal dapat berfungsi sebagai alat pembuktian yang efektif dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayat, Rahmat. "Penerapan Otopsi Medikolegal dalam Kasus Pidana Tanpa Saksi Mata di Indonesia." *Jurnal Pidana dan Hukum* 22, no. 4 (2021): 89-102.
- Jones, Thomas L. "Forensic Pathology and Its Role in Criminal Justice: A Comparative Study." *Journal of Forensic Sciences* 65, no. 4 (2019): 560-568.
- Koh, Lian H. "The Challenges of Forensic Medicine and Autopsy in Southeast Asia." *Asian Journal of Forensic Science* 4, no. 1 (2021): 22-38.
- Nurhadi, Edi. "Implementasi Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Forensik Indonesia* 5, no. 3 (2019): 102-118.
- Purnama, Yudha. "Autopsi dan Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana* 19, no. 2 (2018): 132-146.
- Putra, Andi. "Peran Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Forensik* 9, no. 2 (2020): 234-245.
- Setiawan, Deni. "Keberagaman Penerapan Autopsi Medikolegal di Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2021): 77-91.
- Smith, Robert J., and Clara M. Larson. "Medico-legal Autopsy: A Tool for Justice in the Absence of Eyewitnesses." *International Journal of Legal Medicine* 133, no. 6 (2019): 975-987.
- Sulaiman, Faisal. "Tantangan dalam Penerapan Autopsi Medikolegal di Daerah Terpencil Indonesia." *Jurnal Kesehatan dan Hukum* 13, no. 2 (2020): 145-160.
- Susilo, Arif. "Peran Otopsi Medikolegal dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2020): 45-60.